

**RISALAH RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
HARI JUMAT TANGGAL 4 JULI 2025  
A C A R A**

**1. PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RAPERDA  
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN  
2025  
2. PENYAMPAIAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN  
DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI**

---

- I. A C A R A** : 1. Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025  
2. Penyampaian Pendapat Badan Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
- II. PIMPINAN** : Aris Syarifuddin (Ketua DPRD)
- III. SEKRETARIS** : 1. Sarji, S.IP., M.A.P. ( Sekretaris DPRD )  
2. Bambang Susilo, S.Si., M.Eng. ( Plt. Kepala Bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat)
- IV. TEMPAT/WAKTU** : Ruang Kresna DPRD Kulon Progo Pukul 13.30 – 14.30 WIB
- V. H A D I R** : 32 Anggota
- VI. TIDAK HADIR** : 1. Dra. Keksi Wuryaningsih  
2. Sendy Yulistya Prihandini, S.E.  
3. Raden Sunarwan, S.E.  
4. Rian Nur Fajar  
5. Jeni Widiyatmoko  
6. Wisnu Prastya  
7. Budi Hutomo Putro, S.S.  
8. Husein Pambudi

**VII. JALANNYA RAPAT**

## **A. KETUA DPRD**

Pembacaan teks Pancasila

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo

Yang kami hormati Rekan Pimpinan dan Anggota DPRD

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretris Daerah dan Staf Ahli Bupati

Yang kami hormati Para Pejabat dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Semoga atas ridlo-Nya pula, Rapat Paripurna DPRD hari ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari jumlah 40 Anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak : 32 Anggota, terdiri dari :

1. Fraksi PDI Perjuangan dari tiga belas anggota, yang telah hadir 12 anggota
2. Fraksi Partai Gerindra dari enam anggota, yang telah hadir 3 anggota
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari lima anggota, yang telah hadir 5 anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari lima anggota, yang telah hadir 4 anggota
5. Fraksi Partai Golkar dari lima anggota, yang telah hadir 4 anggota

6. Fraksi Amanat Persatuan Perubahan dari enam anggota, yang telah hadir 4 anggota

Marilah Rapat Paripurna DPRD ini kita awali dengan berdoa, menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai ..... selesai.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirohiim” Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum ( Ketuk Palu 3X ).

Hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Perlu kami informasikan, bahwa Rapat Paripurna DPRD hari ini dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan penyampaian Pendapat Badan Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tersebut.

Acara yang pertama marilah kita ikuti dan dengarkan bersama Penyampaian Nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut oleh Saudara Bupati Kulon Progo, disilahkan. ( Ketuk Palu 1X )

#### **B. BUPATI KULON PROGO (Dr. H. R. AGUNG SETYAWAN, S.T., M.Sc.)**

Bupati Kulon Progo menyampaikan Nota Keuangan dan rancangan Peraturan Daerah.

#### **C. KETUA DPRD**

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Kulon Progo yang telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya sesuai dengan permintaan waktu dari Saudara Bupati untuk membacakan Sistematika Rancangan Peraturan Daerah oleh Saudara Kepala Bagian Hukum, disilahkan.

( Ketuk Palu 1X )

**D. BAGIAN HUKUM (HERI WARSITO, S.T., M.M.)**

Kepala Bagian Hukum membacakan Sistematika Rancangan Peraturan Daerah.

**E. KETUA DPRD**

Terima kasih kepada Saudara Kepala Bagian Hukum yang telah membacakan Sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,  
Acara yang kedua adalah Penyampaian Pendapat Badan Anggaran sekaligus Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Kepada Saudara Juru Bicara Badan Anggaran disilahkan ( Ketuk Palu 1X )

**F. JURU BICARA BADAN ANGGARAN (PANCAR TOPO DRIYO, S.E.)**

Juru Bicara Badan Anggaran menyampaikan Pendapat Badan Anggaran.

**G. KETUA DPRD**

Terima kasih kepada Saudara Juru Bicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan Pendapat Badan Anggaran sekaligus Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati  
Dengan telah selesainya Penyampaian Pendapat Badan Anggaran sekaligus Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka selesai sudah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan segenap hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat hingga selesai.

Tidak lupa kami mohon maaf apabila di dalam memimpin Rapat Paripurna DPRD pada hari ini terdapat kesalahan dan kekhilafan. Marilah kita akhiri rapat ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai .....selesai.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon progo kami tutup dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil’alamiin”  
( Ketuk Palu 3X )

Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KETUA DPRD**



**ARIS SYARIFUDDIN**

**SEKRETARIS**



**SARJI, S.IP., M.A.P.**

| PARAF<br>KOORDINASI                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



---

BUPATI KULON PROGO

---

Sambutan Pada Acara

**PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN  
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

=====

Hari/Tgl : Jumat, 4 Juli 2025  
Lokasi : DPRD Kab. Kulon Progo

---

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***  
***Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yang kami hormati :

- Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda; Staf Ahli Bupati;
- Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; serta
- Bapak-Ibu Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dalam keadaan sehat wal'afiat.

***Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta  
Hadirin yang kami hormati,***

Dalam kerangka siklus anggaran, APBD merupakan suatu sistem rangkaian tahapan (*step by step*) yang sistematis sejak tahap perencanaan, pembahasan, ratifikasi, implementasi dan evaluasi akhir (LKPJ). Salah satu tahap pembahasan anggaran adalah penyusunan Perubahan APBD yang bersifat *event* dan dinamis, dalam artian perubahan APBD dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar

unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Selain hal-hal tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang mendasari perubahan APBD Tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- 2) Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah,

pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah;

- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, seperti penggunaan alokasi dana *specific grant* berupa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi;
- 4) Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar unit organisasi, antar program dan kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar objek belanja serta antar rincian objek belanja;
- 5) Dalam rangka menampung kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Provinsi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan pergeseran APBD dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2025, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah, baik menyangkut masalah pokok yang dihadapi, Kebijakan Umum Perubahan APBD yang ditetapkan, maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menjadi dasar penyusunan perubahan rencana program dan kegiatan,

termasuk strategi dan prioritas yang akan menjadi bahan rujukan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2025 adalah sebagai bahan pembahasan pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

***Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta  
Hadirin yang kami hormati,***

Berikut kami sampaikan estimasi Kebijakan Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025:

**A. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Rencana perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 1,658 triliun rupiah. Target pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 20,266 miliar rupiah atau 1,21 persen dibandingkan dengan APBD murni 2025 sebesar 1,678 triliun rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah naik sebesar 53,017 miliar rupiah, terdiri dari:

- Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 3,844 miliar rupiah;
- Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 55,947 miliar rupiah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1,961 miliar rupiah;
- Lain-lain PAD yang sah turun sebesar 1,046 miliar rupiah.

2. Pendapatan Transfer turun sebesar 73,284 miliar rupiah terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar 36,262 miliar rupiah;
- Pendapatan Transfer antar Daerah turun sebesar 37,021 miliar rupiah.

## B. KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Secara keseluruhan, Belanja Daerah pada perubahan APBD 2025 diproyeksikan naik sebesar 6,172 miliar rupiah atau 0,36 persen dari semula 1,737 triliun rupiah menjadi 1,743 triliun rupiah.

1. Belanja Operasi pada Perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar 82,892 miliar rupiah atau 6,14 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD (Murni) Tahun 2025 sebesar 1,349 triliun rupiah menjadi 1,432 triliun rupiah;
2. Belanja Modal pada Perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan turun sebesar 57,587 miliar rupiah atau 32,6 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Modal APBD (Murni) Tahun 2025, sebesar 176,645 miliar rupiah menjadi 119,057 miliar rupiah.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan turun sebesar 18,118 miliar rupiah atau 82,54 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD (Murni) Tahun 2025 sebesar 21,950 miliar rupiah menjadi sebesar 3,832 miliar rupiah.
4. Belanja Transfer pada Perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan turun sebesar 1,013 miliar rupiah atau 0,54 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Transfer pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar 189,290 miliar rupiah menjadi 188,276 miliar rupiah.

#### C. KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan suatu transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dengan belanja atau

merupakan seluruh transaksi keuangan daerah sebagai penyeimbang adanya surplus atau defisit anggaran.

Kondisi pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah naik sebesar 26,438 miliar rupiah atau 41,86 persen dari semula sebesar 63,163 miliar rupiah menjadi 89,601 miliar rupiah, kenaikan tersebut seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdiri dari :
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,375 miliar rupiah;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar 1,153 miliar rupiah;
  - c. Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar 65,626 miliar rupiah;

- d. Penghematan Belanja-Belanja Modal sebesar 16,940 miliar rupiah;
- e. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebesar 948,754 juta rupiah;
- f. Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar 2,556 miliar rupiah.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran murni yaitu sebesar 4,5 miliar rupiah.

Perbandingan antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) mengalami Surplus sebesar 26,438 miliar rupiah digunakan untuk menutupi defisit anggaran, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan berada posisi berimbang atau nol.

Demikian penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, secara lengkap kami

lampirkan untuk selanjutnya dapat dibahas dan pada saatnya nanti dapat disepakati. Selanjutnya, sebelum kami akhiri penyampaian Nota Keuangan ini, kami mohonkan izin Bagian Hukum untuk dapat membacakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Akhir kata atas perhatian Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

BUPATI KULON PROGO



Dr. R. AGUNG SETYAWAN, S.T., M. Sc., M.M.

| Paraf Koordinasi                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PENDAPAT AWAL BADAN ANGGARAN  
DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2024**

DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024

**PANDANGAN UMUM BADAN ANGGARAN  
DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2025**

---

Assalamu'alaikum wr wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat serta Pimpinan DPRD

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo

Yang kami hormati segenap Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati

Yang kami hormati Sdr. Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

*Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,*

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya pada saat ini, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga atas ridho-Nya pula kita dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Robbalalamiin.

Kami ucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada Badan Anggaran untuk menyampaikan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini.

***Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.***

Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Saudara Penjabat Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Perubahan APBD TA 2025, agar bisa segera dibahas bersama Badan Anggaran DPRD untuk

mendapatkan kesepakatan bersama baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan guna percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada semua Perangkat Daerah, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025 beserta perubahannya.

### ***Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati***

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Bupati Kulon Progo pada tanggal 26 Juni 2025.

Pada Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 ditetapkan

1. Pendapatan Daerah tahun 2025 ada penurunan sebesar Rp. 20.266.348.817,00 (*Dua puluh milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) atau 1,21% yaitu dari semula sebesar Rp 1.678.692.636.822,00 (*Satu trilyun enam ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), pada APBD perubahan menjadi sebesar Rp Rp.1.658.426.288.005,00 (*Satu trilyun enam ratus lima puluh delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah*)
2. Belanja Daerah pada tahun 2025 ada penambahan sebesar Rp. 6.172.167.357,35 (*Enam milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen*) atau 0,36% yaitu dari semula sebesar Rp. 1.737.355.803.868,00 (*Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp.1.743.527.971.225,35 (*Satu trilyun tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen*)
3. Penerimaan Pembiayaan pada APBD 2025 bertambah sebesar Rp. 26.438.516.174,35 (*Dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh lima sen*) atau 41,86%. dari semula sebesar Rp.

63.163.167.046,00 (*Enam puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp.89.601.683.220,35 (*Delapan puluh sembilan milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah tiga puluh lima sen*)

4. Pengeluaran Pembiayaan pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*)
5. Pembiayaan netto pada APBD tahun 2025 semula sebesar Rp. 58.663.167.046,00 (*Lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp.85.101.683.220,35 (*Delapan puluh lima milyar seratus satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah tiga puluh lima sen*) yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

Mendasar Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati maka Bupati telah menyampaikan Rancangan Perubahan APBD TA 2025 ke DPRD pada tanggal 3 Juli 2025 dengan surat nomor 900.1.1/2262 dan DPRD telah melakukan pembahasan dan pencermatan awal.

Dari hasil pencermatan awal, ada beberapa hal yang perlu untuk mendapatkan tanggapan dan penjelasan lebih lanjut dari eksekutif antara lain sebagai berikut :

#### A. UMUM

1. Perubahan APBD TA 2025 menggambarkan bahwa nilai pendapatan belum bisa diandalkan dan keterbatasan kemampuan keuangan. Mohon di sampaikan strategi ke depan terkait potensi untuk mengatasi defisit kebutuhan anggaran guna membiayai belanja yang harus di laksanakan oleh pemerintah daerah!.
2. Mohon penjelasan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peraihan dana-dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi!
3. Mohon Penjelasan progres pengelolaan dan pemanfaatan Gerbang Samodra Raksa agar bisa memberikan PAD dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya !

4. Terkait Amdal dan pengelolaan secara umum pembangunan Amphitheater Kiskendo terkesan tidak ada kesungguhan dan belum optimal. Mohon penjelasan!.
5. Mohon penjelasan progres penyelesaian dan pembangunan Rest Area Sindutan, Temon!.
6. Plaza Kuliner Glagah dibangun dengan harapan dapat menjadi destinasi wisata kuliner yang ramai dikunjungi dan menjadi ikon kuliner Kulon Progo, akan tetapi realitanya Plaza Kuliner tersebut tetap sepi pengunjung dan banyak kios yang tutup. Mohon penjelasan rencana pengelolaan Plaza kuliner Glagah kedepannya!
7. Kulon Progo dahulu memiliki komoditas yang unggul seperti Vanili dan cengkeh, apakah saat ini komoditas tersebut masih menjadi produk unggulan Kulon Progo dan upaya apa yang dilakukan untuk pengembangannya, mohon penjelasan!
8. Usaha dan langkah-langkah apa yang di ambil oleh pemerintah Daerah terhadap BUMD yang kinerjanya belum optimal, mohon penjelasan!.
9. Mohon penjelasan sejauh mana dampak Belanja Daerah Tahun 2025 terhadap pertumbuhan PDRB, pengurangan pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.
10. Sebelum DLH memberikan rekomendasi kepada penambangan di kawasan hijau Kalibawang yang beralasan untuk membuka lahan perkebunan atau pertanian, apakah ada perjanjian yang isinya jika penambang ingkar akan mendapatkan sanksi/denda sesuai dengan nilai kerusakan alam, akses jalan dan material yang ditambang? Mohon penjelasan!
11. LPJU di jalan Provinsi maupun Kabupaten banyak yang mati, seperti di jalan Nagung-Brosot. Terhadap hal tersebut, bagaimana rencana untuk pemenuhan LPJU di Kulon Progo, mohon penjelasan!
12. Strategi dan upaya riil apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi angka kemiskinan yang tidak kunjung turun, mohon penjelasan!
13. Titik rawan kecelakaan lalulintas di perempatan Cicikan Bugel, perempatan Boro Karangsewu, perempatan Cangakan Wahyuharjo menyumbang korban jiwa yang cukup tinggi dan sangat di keluhkan

warga masyarakat. Penyebabnya belum didukung lampu pengatur lalu lintas/traffic light. Ruas jalan tersebut bukan wilayah kewenangan pemerintah kabupaten Kulon Progo. Apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah, mohon penjelasan!

14. Strategi dan inovasi apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan pada Perubahan APBD TA 2025 ini, Mohon penjelasan!.
15. Berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah terutama tanah longsor menyebabkan jalan kabupaten mengalami kerusakan dan penyempitan jalan yang membahayakan para pengguna jalan, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tersebut. Mohon penjelasan!
16. Jalur evakuasi bencana pesisir pantai selatan terutama dari pantai trisik hingga bugel kurang memadai , biarpun itu wewenang dari BBWSO , apakah pemerintah kabupaten Kulonprogo bisa bekerja sama dengan BBWSSO untuk memaksimalkan jalur evakuasi bencana di daerah pesisir selatan tersebut, mohon penjelasan!

## **B. PENDAPATAN**

1. Mohon penjelasan dan data secara rinci, pendapatan daerah yang mengalami penurunan pada Rancangan Perubahan APBD TA 2025!
2. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah, kebijakan dan upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah. Mohon penjelasan!.
3. Inovasi dan Sistem Informasi Manajemen apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk memperlancar pemungutan pajak dan distribusi, supaya bisa mengurangi kebocoran serta bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Mohon penjelasan!.
4. Pendapatan Asli Daerah didominasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas (57%) sehingga celah fiskal untuk pembangunan masih sangat sempit. Mengapa demikian? Mohon penjelasan!
5. Terus menurunnya PAD dari sektor pajak iklan reklame agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dan segera

mengupayakan penertiban seoptimal mungkin karena banyak yang belum berijin. Mohon penjelasan langkah kongkrit apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut!

6. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga turun targetnya 1,1M. Mohon penjelasan!
7. Mohon di jelaskan upaya yang di lakukan pemerintah daerah ,agar sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi yang signifikan ke PAD.
8. Pada saat ini masih banyak keluhan dari Masarakat yang akan membayar BPHTB karena harga transaksi yang ditentukan pemerintah daerah sebagai dasar pengenaan BPHTB jauh melebihi harga transaksi real/harga pasar, sehingga banyak yang tidak melakukan pembayaran BPHTB. Mohon penjelasan kebijakan apa yang akan di lakukan pemerintah Daerah terhadap hal tersebut!
9. Pertanian merupakan sektor yang dominan di Kulon Progo dan banyak produk unggulan hasil pertanian hortikultura seperti kopi menoreh, durian, kakao, cabe, bawang merah, semangka, melon dan lainnya. Agar Produk pertanian bisa mendukung Pendapatan Asli Daerah secara signifikan, upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah, mohon penjelasan!
10. Mohon penjelasan pengelolaan aset tetap daerah dalam upaya meningkatkan PAD!

### **C. BELANJA**

1. Mohon penjelasan belanja pegawai di Perubahan APBD TA 2025 dan rencana penggunaanya !.
2. Mohon penjelasan pemenuhan belanja mandatory spending di tahun 2025?
3. Mohon penjelasan pemenuhan belanja pembangunan infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kulon Progo karena banyaknya keluhan masyarakat yang jalannya rusak parah!
4. Jalur wisata dari Nglinggo - Tritis - Keceme Suroloyo dan ruas jalan wisata Totogan - Suroloyo jalanya sudah banyak yang rusak akibat tidak adanya perawatan jalan dan adanya beberapa titik longsor tiap musim hujan yang belum tertangani terutama ruas jalan Tritis –

Suroloyo. Agar tidak terlalu berlarut larut dan tingkat kerusakan jalan semakin parah, Rencana dan upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan jalan tersebut, mohon penjelasan!

5. Jalan Banaran-Pantai Trisik rusak parah karena imbas tambang pasir di sungai Progo , mengingat jalan tersebut merupakan jalur evakuasi bencana dan dilewati jalan JJLS (Baru) , apakah Pemerintah kabupaten sudah menganggarkan untuk merekonstruksi jalan tersebut ? mohon penjelasan!.
6. Mohon dijelaskan terkait pembangunan Imfrastruktur pendukung obyek wisata yang dilaksanakan di TA 2025.
7. Pemanfaatan dana keistimewaan selama ini belum merata. Penggunaanya masih didominasi oleh beberapa perangkat daerah atau sektor tertentu, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan perluasan pemanfaatan dana keistimewaan guna mengatasi kemiskinan, sehingga semua sektor bisa merasakan atau membuat program yang bisa mendapatkan pembiayaan dari dana tersebut. Mohon penjelasan!.
8. Sektor pariwisata sangat setrategis untuk meningkatkan PAD. Untuk mendukung hal tersebut, pembangunan jalan menuju obyek-obyek wisata agar menjadi prioritas. Ruas-ruas jalan tersebut ada yang statusnya merupakan jalan Kabupaten ada juga yang merupakan jalan Desa. Terhadap permasalahan tersebut bagaimana kebijakan dan rencana pemerintah daerah, mohon penjelasan!.
9. Di Tahun Anggaran 2025 ini berapa alokasi anggaran yang di gunakan untuk pemulihan ekonomi akibat efisiensi dan untuk pemenuhan program dari pemerintah pusat (sekolah rakyat, Sekolah Unggulan Garuda dan Koperasi Merah Putih). Apa bentuk kegiatannya, dan bagaimana rencana selanjutnya, mohon penjelasan!

#### **D . PEMBIAYAAN**

1. Mohon penjelasan rincian dan rencana penggunaan SiLPA pada Perubahan APBD TA 2025!

***Hadirin rapat paripurna yang kami hormati,***

Demikianlah Pandangan Umum Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, yang harus dijawab secara tertulis dan disampaikan dalam rapat kerja. Bersama ini juga kami sampaikan pendapat fraksi-fraksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Badan Anggaran ini, yang harus dijawab juga secara tertulis dan disampaikan dalam rapat kerja.

Terhadap hal-hal yang belum kami sampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini, akan kami bahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama eksekutif. Sebelum kami akhiri, apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kulon Progo, 4 Juli 2025  
BADAN ANGGARAN  
DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
KETUA

ARIS SYARIFUDDIN



***Hadirin rapat paripurna yang kami hormati,***

Demikianlah Pandangan Umum Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, yang harus dijawab secara tertulis dan disampaikan dalam rapat kerja. Bersama ini juga kami sampaikan pendapat fraksi-fraksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Badan Anggaran ini, yang harus dijawab juga secara tertulis dan disampaikan dalam rapat kerja.

Terhadap hal-hal yang belum kami sampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini, akan kami bahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama eksekutif. Sebelum kami akhiri, apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

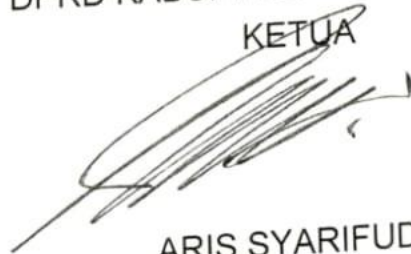
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kulon Progo, 4 Juli 2025

BADAN ANGGARAN

DPRD KABUPATEN KULON PROGO

KETUA

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive representation of the name Aris Syarifuddin.

ARIS SYARIFUDDIN



**Fraksi PDI Perjuangan  
DPRD Kabupaten Kulon Progo**

**PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN KULON PROGO**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Ditampilkan dalam  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
Pada Jumat, 4 Juli 2025**

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat Siang,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu, Namo Budaya

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan saudara-saudara anggota DPRD,

Yang kami hormati Saudara Bupati Kulon Progo,

Saudara Staf Ahli Bupati,

Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,

Saudara Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kulon Progo,

Saudara Sekretaris DPRD beserta stafnya.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat TUHAN yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul ditempat ini untuk menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sebelum menyampaikan Pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas waktu yang telah diberikan.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang telah melakukan pembahasan-pembahasan dalam Rapat Kerja baik secara internal maupun dengan Pemerintah Daerah untuk meminta keterangan-keterangan dan klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran umum kondisi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, yang meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan maupun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah terjadi perubahan kebijakan yang berkembang, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sendiri terhadap beberapa asumsi dan kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dengan melaksanakan Perubahan APBD.

Kita ketahui bersama, bahwa tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang tertuang pada RKPD tahun 2025 adalah *“Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin”*, adapun 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan
5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

Prioritas pembangunan selama 1 tahun ini yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian prioritas Pembangunan ini sudah terlaksana separuh perjalanan tahun anggaran. Maka dari itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan berkaitan Ketercapaian 5 prioritas pembangunan selama separuh perjalanan ini sudah berapa persen? Dan berapa persentase kebijakan anggaran yang telah digunakan? Serta program yang sudah dilaksanakan guna mengukur ketercapaian 5 prioritas pembangunan?

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah mencermati draft Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 dapat berpengaruh pada postur APBD dan juga berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Mohon penjelasan,
  - a. Langkah penyesuaian apa yang telah dan akan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghadapi kebijakan ini?
  - b. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan setelah perubahan APBD?
  - c. Apakah ada inovasi atau terobosan yang dilakukan untuk mencapai program prioritas pembangunan?
  - d. Bagaimana rencana Pemerintah Daerah dalam mengukur dampak nyata dari program-program prioritas yang diakomodir dalam perubahan APBD, terutama setelah adanya penyesuaian anggaran?
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar *Rp 434.440.294.903* dan Pendapatan Transfer sebesar *Rp 1.223.985.993.102*, didapatkan jumlah Total Pendapatan sebesar *Rp 1.658.426.288.005*. Melihat gambaran anggaran pendapatan dalam Perubahan APBD 2025 berkurang sebesar *Rp 20.266.348.817*. Pendapatan

transfer yang mengalami penurunan cukup signifikan ini, tentunya akan berpengaruh pada kebijakan dan program yang sudah termuat dalam RKPD Tahun 2025. Mohon penjelasan,

- a. Bagaimana langkah Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan pembangunan tahun 2025?
  - b. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah ke depan ketika pendapatan transfer Pemerintah Pusat maupun Antar Daerah belum bisa terpenuhi?
  - c. Apa saja program yang mengalami pergeseran pada tahun ini dan Bagaimana tindaklanjut ke depan?
3. Melihat dari porsi Belanja Daerah, bahwa pada Belanja Operasi *bertambah* sebesar Rp 82.892.284.937,50, Belanja Modal *berkurang* sebesar Rp 57.587.883.637,00, Belanja Tidak Terduga (BTT) *berkurang* sebesar Rp 18.118.587.141,15, Belanja Transfer *berkurang* sebesar Rp 1.013.646.802,00.
- a. Pada pos Belanja operasi, Apa dasar pertimbangan yang menyebabkan penambahan anggaran? Apakah sudah sesuai dengan harapan kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran? Bagaimana korelasinya dengan prioritas pembangunan?
  - b. Pada pos Belanja modal, Bagaimana penurunan belanja modal ini berdampak pada pembangunan infrastruktur dan aset daerah?
  - c. Pada pos Belanja tidak terduga, Apa dasar pertimbangan yang menyebabkan pengurangan anggaran? Selain itu, mekanisme pembiayaan darurat apa yang akan ditempuh pemerintah daerah jika ada kondisi mendesak darurat?
4. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp 695.651.921.700, bahwa ini menjadi bagian dari DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang penggunaannya tidak diatur secara spesifik oleh Pemerintah Pusat. Mohon penjelasan mengenai kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam rencana penggunaan anggaran tersebut.

5. Mohon penjelasan, bagaimana Pemerintah Daerah akan menyampaikan informasi perubahan APBD ini kepada publik, khususnya terkait dengan adanya kebijakan efisiensi dan dampaknya terhadap program pembangunan?

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Adapun beberapa hal yang belum kami sampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini, akan kami sampaikan dalam Rapat-rapat kerja selanjutnya.

Dan semoga ALLAH SWT, TUHAN Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita membangun Kulon Progo ini dapat terlaksana dengan baik.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Merdeka...!

Pengasih, 4 Juli 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

KETUA



YULI YANTORO, S.E.

SEKRETARIS



DEWI NUGRAHENI, S.T.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG  
PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

---

***Assalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.  
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan.

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

Yang kami hormati Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Yang kami hormati Staf Ahli Bupati.

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.

Yang kami hormati segenap Kepala Dinas, Kantor & Badan se-Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.

Hadirin dan undangan yang kami hormati.

*Alhamdulillah, Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman, kesempatan, dan kesehatan serta ilmu kepada kita, sehingga diwaktu yang baik ini, kita bisa bertemu dan menghadiri kembali acara sidang paripurna kali ini. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pandangannya mengenai Raperda *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025*.*

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,***

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang responsif terhadap perkembangan dan dinamika ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan realisasi semester pertama, proyeksi akhir tahun, serta kebijakan fiskal terbaru dari pemerintah pusat.

Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang

menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,***

Mengawali pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025. Setelah mencermati, maka kami FP Gerindra menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seperti apa progres program MBG di Kulon Progo? Mohon penjelasan.
2. Bagaimana dengan sumber pendanaanya? Mohon penjelasan.
3. Kendala apa saja yang dihadapi baik secara administrasi maupaun secara teknis di lapangan? Mohon penjelasan.
4. Seperti apa evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 ini? Mohon penjelasan.
5. Seperti apa progres program Sekolah Rakyat di Kulon Progo? Mohon penjelasan.
6. Bagaimana dengan pos pendanaanya? Mohon penjelasan.
7. Kendala apa saja yang dihadapi di lapangan? Mohon penjelasan.
8. Seperti apa progres program Koperasi Merah Putih di Kulon Progo? Mohon penjelasan.
9. Bagaimana dengan pembiayaanya? Mohon penjelasan.
10. Kendala apa saja yang dihadapi di lapangan? Mohon penjelasan.

11. Seperti apa keberadaan/kedudukan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk saat ini? Mohon penjelasan.
12. Apakah nanti akan bersinggungan dengan unit bisnis Koperasi Merah Putih? Bagaimana solusinya? Mohon penjelasan.
13. Seperti apa realisasi cadangan pangan di kulon progo? Mohon penjelasan.
14. Seperti apa realisasi cadangan pangan di tingkat Kalurahan? Mohon penjelasan.
15. Apakah kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat mempengaruhi perubahan APBD 2025? Mohon penjelasan.
16. Apa program/kegiatan baru yang diusulkan dalam perubahan APBD dan mengapa dianggap prioritas? Mohon penjelasan.
17. Apakah terdapat kegiatan yang dialihkan, ditunda, atau dihentikan dalam perubahan APBD 2025? Mohon penjelasan.
18. Apakah perubahan APBD melibatkan pergeseran anggaran antar OPD atau antar program? Mohon penjelasan.
19. Apakah ada kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang menjadi dasar perubahan anggaran? Mohon penjelasan.
20. Apakah perubahan APBD telah mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan semester I tahun 2025? Mohon penjelasan.

21. Apakah ada evaluasi terhadap kegiatan yang serapan anggarannya rendah dan bagaimana tindak lanjutnya? Mohon penjelasan.
22. Apa indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas perubahan APBD 2025? Mohon penjelasan.
23. Mohon data jumlah dan prosentase stunting di Kulon Progo untuk 5 tahun terakhir.
24. Mohon data jumlah dan prosentase penduduk dibawah garis kemiskinan di Kulon Progo untuk 5 tahun terakhir.
25. Mohon data jumlah dan prosentase pengangguran di Kulon Progo untuk 5 tahun terakhir.
26. Mohon data jumlah berkurangnya luas lahan baku sawah di Kulon Progo untuk 5 tahun terakhir.
27. Mohon data jumlah dan prosentase deforestasi di Kulon Progo untuk 5 tahun terakhir.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,***

Demikian Pandangan Umum FP GERINDRA terhadap *Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025*, kemudian pencermatan lebih lanjut akan kami lakukan pada rapat dan pembahasan berikutnya, apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan, kami minta maaf, sekian.

***Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh***

Pengasih, 4 Juli 2025

**FRAKSI GERINDRA  
DPRD KABUPATEN KULON PROGO**

Ketua,



(Sendy Yulistya Prihandiny, S.E.)

Sekretaris,



(Tito Kurniawan, S.H.)



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

---



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KAB. KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025**



Disampaikan dalam :

RAPAT PARIPURNA

DPRD KAB. KULON PROGO

Jumat, 04 Juli 2025

PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KAB. KULON PROGO  
TAHUN ANGGARAN 2025

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati Anggota DPRD Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati Sekretaris Daerah

Yang kami hormati Sekretaris Dewan

Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan Kantor di Lingkungan Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati hadirin Rapat Paripurna yang mengikuti Rapat Paripurna hari ini.

**Hadirin Rapat Paripurna yang Berbahagia,**

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Alloh Swt yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya kepada kita semua sehingga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan dapat melaksanakan Rapat Paripurna pada kesempatan hari

ini. Sholawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatNya dihari akhir nanti, Amin.

Terimakasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk dapat menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran Tahun 2025.

Terimakasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran Tahun 2025, sehingga dapat segera ditindaklanjuti DPRD mengingat terbatasnya waktu pembahasan.

Terimakasih kepada Badan Anggaran yang telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2025 dan menjadi acuan bagi Fraksi Partai Partai Kebangkitan Bangsa dalam pembahasannya.

### **Hadirin Rapat Paripurna yang Berbahagia,**

Setelah melakukan pembahasan di internal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa serta memperhatikan pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran Tahun 2025, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan pandangan sebagai berikut :

#### **I. UMUM**

1. Masih banyaknya infrastruktur pendukung ekonomi, pariwisata yang masih rusak, bagaimana pemerintah menindaklanjuti hal tersebut.
2. Banyaknya aduan dari masyarakat terkait tidak aktifnya BPJS PBI diKulon Progo mengakibatkan keresahan bagi warga masyarakat, karena masyarakat masih membutuhkan BPJS tersebut, bagaimana hal pemerintah daerah menindaklanjutinya?.
3. Bagaimana pelaksanaan MBG sejauh ini?. Mohon penjelasan  
Mohon adanya pengawasan yang intens terhadap jalannya MBG tersebut.
4. Apa perbedaan sekolah rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya?.  
Mohon penjelasan, mengapa harus ada gedung baru, mengapa tidak bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada?.
5. Banyaknya aduan dari petani terkait kelangkaan pupuk, menyebabkan terhambatnya pengelolaan pertanian dan menimbulkan keresahan, hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun mengapa tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah?.

## **II. PENDAPATAN**

1. Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1658.426.288.005,00  
(setelah perubahan)  
  
Pendapatan Daerah tahun murni 2024 sebesar  
Rp.1.693.928.324.800,00 setelah perubahan sebesar Rp.  
1.738.855.434.689,95  
  
Pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.663.952.460.133  
sebelum perubahan sebesar Rp. 1.602.783.129.7555,02

Pendapatan Daerah pada perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp.1.208.435.027.066 dan sebelum perubahan sebesar Rp.1.480.627.306.674 tahun 2021 sebelum perubahan Rp.1.561.077.793.439 setelah perubahan sebesar Rp.1.565.699.404.292 sementara pada tahun 2020 sebesar Rp.1.626.815.467.509,23

Mengapa pendapatan daerah menurun dari APBD Murni sebesar Rp.20.266.348.817,00 dan menurun dari tahun 2024 mohon penjelasan?.

Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.3.844.000.000

Lain-lain PAD yang sah turun Rp.1.046.565.095,00

Mohon penjelasan

2. Dengan adanya efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat, bagaimana pemerintah daerah menindaklanjutinya?. Mohon penjelasan

Bagaimana dampak efisiensi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat?.

### **III. BELANJA**

1. Belanja tahun 2025 sebesar Rp. 1.743.527.971.225,35 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.172.167.357,35 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, mengapa demikian dan mohon penjelasan dan rincian?.
2. Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp. 18.418.638.400,00 setelah perubahan sebesar Rp. 17.237.800.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.180.837.900,00 dalam situasi

kemiskinan yang tinggi, mengapa bantuan sosial malah turun, mohon penjelasan?.

Belanja hibah , belanja subsidi juga mengalami penurunan setelah perubahan, mohon penjelasan?.

### **Hadirin Rapat Paripurna yang Berbahagia,**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran Tahun 2025. Adapun hal-hal yang belum kami sampaikan dalam pandangan umum ini, akan kami sampaikan dan bahas dalam rapat kerja selanjutnya. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf.

***Wallohul Muwafiq Li Aqwa mithoriq***

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Kulon Progo, 04 Juli 2025

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

KETUA



**QOIS REIZA FAHMI**

SEKRETARIS



**SUTRISNO**

**PENDAPAT UMUM  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

*Assalaamu'alaikum Wr Wb*

Yang kami hormati,  
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD,  
Saudara Penjabat Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo,  
Segenap Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo,  
Saudara Staf Ahli Bupati,  
Saudara Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah,  
Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian di lingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo,  
Saudara Sekretaris Dewan beserta staf,  
Hadirin Rapat Paripurna dan para tamu undangan yang berbahagia,

*Alhamdulillahirabbil 'alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum Badan Anggaran dan Fraksi-Fraksi atas *Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025*.

Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum terhadap *Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025* tersebut.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan seluruh jajaran eksekutif yang telah menyampaikan Rancangan Perubahan APBD ini, yang didahului dengan disampaikannya Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Anggaran yang telah membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 tersebut dengan efektif dan telah menyusun pandangannya. Secara umum kami setuju dengan hasil pembahasan Badan Anggaran.

*Hadirin rapat paripurna yang berbahagia,*

Selanjutnya, perkenalkan kami sampaikan pendapat dan pertanyaan Fraksi PKS dalam poin-poin sebagai berikut.

1. Mohon penjelasan mengenai penurunan pajak PBBP2?
2. Mohon disampaikan data wajib pajak air tanah beserta kewajiban pajaknya!
3. Mohon data wajib pajak untuk PBJT-Hotel di seluruh Kulon Progo dengan rinciannya potensi pajaknya!
4. Mohon data potensi PBJT-penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir antara 2024-2026!

5. Mohon disampaikan semua data tempat titik pemasangan reklame papan/billboard/videotron di Kulon Progo dan berapa pajaknya masing-masing!
6. Mohon data tempat produksi tambang MBLB di Kulon Progo beserta pemasukan pajaknya masing-masing!
7. Mohon penjelasan berkaitan dengan turunnya retribusi pelayanan pasar!
8. Mohon disampaikan data pasar di seluruh KP.
9. Mohon penjelasan berkaitan dengan turunnya retribusi pelayanan kebersihan!
10. Berapa potensi retribusi pelayanan kebersihan, mohon rinciannya selama 3 tahun terakhir!
11. Retribusi penyediaan tempat parkir khusus parkir diluar badan jalan mengalami kenaikan. Mohon disampaikan data tempat parkir khusus diluar badan jalan yang dimaksud.
12. Mohon rincian potensi retribusi penyediaan tempat parkir khusus parkir diluar badan jalan dalam 3 tahun terakhir dari 2024-2026!
13. Mohon penjelasan berkaitan dengan turunnya retribusi pelayanan tempat rekreasi priwisata dan olah raga!
14. Mohon disampaikan data tempat rekreasi dan olah raga beserta potensi retribusinya dalam 3 tahun 2024-2026!
15. Mohon penjelasan mengenai turunnya DAK pada perubahan ini!
16. Mohon penjelasan berkaitan dengan berkurangnya belanja hibah koperasi!
17. Mohon penjelasan berkaitan dengan berkurangnya belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang

telah memiliki surat keterangan terdaftar! Mohon disertakan rinciannya.

18. Mohon penjelasan berkaitan dengan berkurangnya belanja Bansos kepada individu!
19. Mohon penjelasan mengenai turunnya belanja modal tanah!
20. Belanja modal peralatan dan mesin bertambah hingga 9,5 M, mohon penjelasan rincian penggunaannya!
21. Belanja alat peraga PAUD berkurang sangat signifikan, mohon penjelasan!
22. Mohon penjelasan penurunan belanja jasa tenaga pendidikan sekitar 2,2 M!
23. Pemerintah Daerah memiliki kendala dalam hal peningkatan PAD, salah satunya disebabkan oleh regulasi/aturan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memadai, sehingga masih perlu dilakukan revisi/perbaikan atas regulasi/aturan tersebut. Mohon penjelasan regulasi/aturan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana saja yang belum memadai dan yang masih perlu dilakukan revisi/perbaikan!
24. Mohon penjelasan, sistem dan aplikasi perpajakan daerah yang seperti apa yang mendukung dan dibutuhkan Pemerintah Daerah?
25. Apa saja yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi abrasi di pesisir pantai selatan yang setiap bulannya menunjukkan perubahan yang signifikan?
26. Apa saja program kegiatan yang diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dan berapa masing-masing anggarannya?

27. Program apa saja yang direncanakan untuk mengurangi pengangguran dan berapa besaran masing-masing anggarannya?

*Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,*

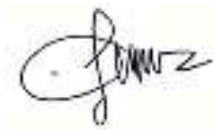
Demikian penyampaian Pendapat Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Perubahan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*, hal-hal yang belum jelas akan kami sampaikan dalam rapat kerja. Apabila di dalam penyampaian ini terdapat kekhilafan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pengasih, 4 Juli 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua,



Agung Raharjo, S.T.

Sekretaris,



Jeni Widiyatmoko



**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**



*Jl. Sugiman, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 55611 Telp. (0274)773271  
Email : [setwan@kulonprog.go.id](mailto:setwan@kulonprog.go.id), Website : [dprd-kulonprogokab.go.id](http://dprd-kulonprogokab.go.id)*

---

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum wr.wb  
Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormati :

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD ;  
Saudara Bupati dan wakil Bupati Kulon Progo ;  
Saudara-saudara anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo ;  
Saudara Staf Ahli Bupati;  
Saudara Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretaris Daerah;  
Saudara Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah kabupaten Kulon Progo;  
Saudara Sekretaris DPRD beserta stafnya;  
Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan ini. Perkenankanlah kami Fraksi Partai Golkar menyertai hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat bertemu dan mengikuti Rapat Paripurna dewan hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Rapat Paripurna hari ini dapat berjalan dengan tertib, lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kulon Progo pada umumnya.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Fraksi.

Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bupati Kulon Progo atas penyampaian rancangan peraturan daerah dimaksud.

**Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Sebelum mencermati dan mengkritisi struktur dan perangkat rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, Fraksi Partai GOLKAR akan mencermati

dan mengkritisi hasil evaluasi kinerja makro ekonomi dan sosial tahun berjalan 2025 yang disampaikan saudara Bupati.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan penyesuaian rencana pendapatan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat serta pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan target pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat terealisasi dengan kondisi yang ada.

selanjutnya, pertimbangan yang sangat perlu dilakukannya perubahan APBD ini antara lain penyesuaian target PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa ada dua arus besar dalam pembahasan perubahan APBD ini, yaitu arus PENDAPATAN dan arus BELANJA. Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki *multyplier effect* terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kulon Progo yang lebih berkeadilan. Bertitik tolak dari prinsip dasar inilah sesungguhnya kita bisa melihat apakah perubahan RAPBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh *political will* yang baik atau tidak. Mencermati kebijakan dan perangkaan sebagaimana tertuang pada Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD yang disampaikan oleh saudara Penjabat Bupati yang juga merupakan hasil evaluasi antara eksekutif dan legislative, FPG pada prinsipnya dapat memahami dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini. Sebagaimana termuat di dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.741.855.803.868,00 bertambah sebesar Rp.6.172.167.357,35 sehingga menjadi Rp.1.748.027.971.225,35 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah : Semula Rp.1.678.692.636.822,00, Berkurang (Rp.20.266.348.817,00) sehingga Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.658.426.288.005,00
2. Belanja daerah : Semula Rp.1.737.355.803.868,00, Bertambah Rp.6.172.167.357,35 sehingga Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.743.527.971.225,35
3. Pembiayaan daerah : Penerimaan Pembiayaan Semula Rp.63.163.167.046,00, Bertambah Rp.26.438.516.174,35 sehingga Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.89.601.683.220,35

Selanjutny FPG menyampaikan pandangan sekaligus permohonan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas beberapa hal sebagai berikut:

1. FPG memandang bahwa Perubahan APBD merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. FPG mohon gambaran bagaimana capaian berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, kehidupan umat beragama, lingkungan hidup, informasi, hukum, penanganan bencana, dan sebagainya.
3. FPG Mohon disampikan alokasi APBD yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik.
4. FPG memandang bahwa Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara itu, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. Apakah hal ini sudah tercapai mohon penjelasan.
5. FPG mengharapkan bahwa perubahan APBD ini harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat.
6. Sejauh mana tambahan belanja pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian?
7. FPG sangat menekankan bahwa penyesuaian ini bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan bagian dari strategi mengarahkan belanja pada hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

8. FPG memandang terhadap Pendapatan yang naik, tetapi tentunya pemda harus tetap pada bagaimana dana ini bisa menyentuh sektor yang memberi dampak langsung. FPG Kita tidak hanya bicara mengenai proyek semata, tapi keberlanjutan dan pemerataan layanan itu yang harus menjadi perhatian utama.
9. Mohon disampaikan kajian ilmiah potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, retribusi maupun lain-lain PAD yang sah?
10. Penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah khususnya Retribusi Daerah masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
11. Mohon disampaikan Penerimaan Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dari BUMD tahun ini. Apa kendala yang dihadapi serta pembinaan seperti apa yang sudah dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada BUMD agar dapat memberikan kontribusi penerimaan terhadap PAD?
12. Dalam pengelolaan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :  
Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap total anggaran pendapatan, Belum tergalinya semua potensi penerimaan daerah, Belum optimalnya koordinasi dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah. Mohon penjelasan.
13. Apakah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah mempunyai sistem serta pola penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan? Karena FPG masih melihat ada OPD yang menetapkan target-target belanja tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Mohon penjelasan.
14. Mohon disampaikan apa yang menjadi terobosan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi. Mohon Penjelasan
15. Bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan Lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Mohon penjelasan
16. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Mohon penjelasan
17. Bagaimana upaya pemda dalam rangka pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi.
18. Apakah sudah dilakukan pembangunan infrastruktur jalan yang memperhatikan keseimbangan antar wilayah dan lebih memprioritaskan pada jalan menuju pusat-pusat kegiatan produktif masyarakat dan membuka isolasi wilayah. Mohon penjelasan
19. Dalam permasalahan belanja yang selama ini selalu terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain :  
Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran, Relevansi program atau kegiatan kurang responsif dengan permasalahan dan atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi, spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.

FPG mempertanyakan, Apa langkah sdr Bupati untuk mengatasi permasalahan belanja tersebut ? Mohon dijelaskan.

**Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Sebelum mengakhiri Pandangan ini, FRAKSI PARTAI GOLKAR mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tapi juga taat azaz dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kulon Progo. karena itu, peningkatan pendapatan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam prinsip politik anggaran daerah, APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan krusial yang dihadapi masyarakat, Jika tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan dasar tersebut, APBD tersebut layak dinilai tidak kredibel.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi “roh” dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kita semua berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pengasih, 4 Juli 2025

**Mengetahui**  
**Pimpinan Fraksi Partai GolKar**

**Ketua**



**WIDIYANTO, S.Pd**

**Sekretaris**



**Drs. SASMITA HADI**



**FRAKSI AMANAT PERSATUAN PERUBAHAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PENDAPAT  
FRAKSI AMANAT PERSATUAN PERUBAHAN  
DPRD KULON PROGO  
TERHADAP  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

*Disampaikan  
Pada Rapat Paripurna  
Hari Jumat, 04 Juli 2025*

**PENDAPAT**  
**FRAKSI AMANAT PERSATUAN PERUBAHAN**  
**DPRD KULON PROGO**  
**TERHADAP**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamu'alaikum wr wb

Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semuanya

- Yang kami hormati saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD,
- Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati
- Yang kami hormati saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo,
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan asisten Sekretaris Daerah,
- Yang kami hormati staf Ahli Bupati,
- Yang kami hormati Sekretaris Dewan beserta stafnya,
- Yang kami hormati bapak dan Ibu kepala OPD atau Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya, diantaranya pada saat ini kita mendapat ridhoNya untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam keadaan sehat wal afiat. Amin

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Aamiin

**Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat,**

Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada Fraksi Partai Amanat Persatuan Perubahan untuk menyampaikan Pendapat pada Rapat Paripurna hari ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan gambaran umum kondisi keuangan daerah dalam rangka penyusunan APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan maupun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah membahas APBD tahun anggaran 2025 ini.

**Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat,**

Setelah mencermati laporan dari Badan Anggaran DPRD Kulon Progo dan hasil koordinasi internal, kami Fraksi Amanat Persatuan Perubahan menyatakan sependapat dengan Laporan Badan Anggaran namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan maupun klarifikasi. Adapun hasil pencermatan Fraksi Amanat Persatuan Perubahan terhadap APBD tahun 2025 yaitu :

1. Mohon penjelasan Langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk mengatasi defisit anggaran pada tahun 2025.
2. Berbagai permasalahan terjadi pada program Makan Bergizi Gratis diantaranya Kasus keracunan dikarenakan adanya potensi masalah dalam rantai pasokan makanan, termasuk penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan. Kurangnya transparansi yang menyulitkan pemantauan dan evaluasi program serta meningkatkan potensi penyalahgunaan. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah mengantisipasi hal tersebut. Mohon Penjelasan !.

3. Mohon penjelasan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pendirian sekolah rakyat serta bagaimana realisasi kepesertaan (kategori) sekolah rakyat tersebut bagi warga masyarakat Kulon Progo.
4. Mohon disampaikan data event yang diselenggarakan oleh masing-masing OPD pada perubahan anggaran tahun 2025 yang dibiayai oleh pemerintah daerah serta bagaimana efek positif yang muncul dari kegiatan tersebut bagi masyarakat Kulon Progo.
5. Sebagian program kerja yang tidak bisa diakomodir dalam perubahan APBD 2025 karena keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk bisa memperjuangkan pelaksanaan program tersebut, Mohon penjelasan !
6. Mohon penjelasan tentang kinerja BUMD terutama SAK.

**Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat,**

Demikian Pendapat/Pandangan Umum FAPP terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Fraksi Amanat Persatuan Perubahan

DPRD Kabupaten Kulon Progo

Ketua



Upiya Al Hasan

Sekretaris



Nasib Wardaya, S. Pd